

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari analisa bab IV dan hal yang telah dijabarkan di dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yakni :

##### **5.1.1 Kewajiban Pembentukan Peraturan Rektor Terkait Pembentukan Satuan Tugas Berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021**

Peraturan Rektor terkait pembentukan Satuan Tugas merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi seluruh Indonesia. Kewajiban tersebut berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan. Serta Menteri Pendidikan sendiri memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada Perguruan Tinggi yang tidak melakukan pembentukan Satuan Tugas sesuai yang diatur di dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

### **5.1.2 Efektivitas Pembentukan Satuan Tugas dalam Menekan Angka Kekerasan Seksual Berdasarkan Peraturan Rektor**

Efektivitas dalam pembentukan Satuan Tugas PPKS di perguruan tinggi yang bertujuan untuk mengurangi angka kekerasan seksual, sulit diukur karena tidak adanya data yang akurat terhadap kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Hal ini dikarenakan banyak kasus yang tidak dilaporkan akibat adanya faktor relasi kuasa dan gender. Meskipun kebijakan dalam Permendikbud untuk penanganan kekerasan seksual sudah cukup efektif, tetapi untuk pencegahannya masih sangat bergantung pada kesadaran individu dan pemahaman masyarakat kampus. Karena Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 sendiri masih tergolong baru, perguruan tinggi harus mempertimbangkan terkait dinamika relasi kuasa dan gender untuk memberikan dukungan kepada korban untuk mendorong pelaporan dan perubahan budaya menuju lingkungan yang lebih responsif terhadap kekerasan seksual.

### **5.2 Saran**

1. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Pendidikan sendiri memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada Perguruan Tinggi terkait pembentukan Satuan Tugas, sehingga Menteri Pendidikan seharusnya secara tegas dapat mulai memberikan sanksi yang sesuai dengan apa yang tertulis di Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 agar Perguruan Tinggi yang belum melaksanakan pembentukan tersebut tidak menunda-nunda pembentukan Satgas PPKS.
2. Menteri dapat melakukan evaluasi dan perubahan terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.
3. Meningkatkan Edukasi dan Kesadaran warga kampus dengan melakukan sosialisasi rutin yang wajib dihadiri.
4. Memasukkan materi tentang kekerasan seksual ke dalam kurikulum perguruan tinggi dan menyertakan topik tersebut dalam mata kuliah wajib.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Sunaryati Hartono. (2006). *Penelitian Hukum di Indonesia*. Bandung: PT Alumnus.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ronny Hanitio Soemitro. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Semarang: Ghalia Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amir Ilyas, S.H., M.H. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Lukman Hakim, S.H., M.H. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Deepublish.
- Buku Saku Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UNPAR.

### Jurnal :

- Chen, J. (2020). Sexual violence, stalking, and intimate partner violence by sexual orientation, United States. *Psychology of Violence*, 10(1), 110–119.
- Mintje, J. S. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Melalui Media Sosial. *Lex Privatum*, 11(1).
- Irfawandi, I., Irwanda, H., Zahra, M. Z., M. Syukur., & Ibrahim, I. (2023). Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(04), 383-392.
- Oheo, K. H., Sabrina, H., & Arniyanti, A. (2023). Batasan Kekerasan Seksual Secara Verbal dalam RKUHP dan Undang-Undang TPKS. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 13-30.
- Printa, D. U. A., Dyah, I., Hanifatus, S., Alfira, M. S., Muhammad, N. N. (2021). Analisis Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswi Unri Terhadap Permendikbudristek No 30 Tahun 2021. *Lontar Merah*, 4(2), 401-407.
- Woruntu, O. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Praktik Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Menurut Peraturan Menteri Pendidikan,

Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. *Lex Privatum*, 13(2).

Naysila, N., & Purwanto, D. (2024). Kebijakan Universitas Muhammadiyah Jember dalam Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 1-11.

Puja, A. A. A. W. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). *Penghapusan Kekerasan Seksual malam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Indonesia*, Vol. 3 No. 1, *Jurnal Preferensi Hukum*, 2022, 108-114.

Nikmatullah, N. (2020). Demi nama baik kampus vs perlindungan korban: kasus kekerasan seksual di kampus. *Qawwam*, 14(2), 37-53.

Maulinda, T. E., Asbari, M., & Selviana, S. (2024). Membangun Kampus Merdeka: Mencegah dan Mengatasi Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 3(1), 78-84.

Pratama, J. P., ALW, L. T., & Pinilih, S. A. G. (2022). Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan The Existence of the Position of Ministerial Regulations Against Regional Regulations. *Jurnal Konstitusi*, 19(4),

Kartikasari, D. W., Apriono, D., Syahrial, M. F., & Zaki, A. (2024). Upaya Peningkatan Pemahaman tentang Pencegahan dan Penanganan dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(3).

Irawan, S. S. (2024). Tindak Lanjut Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Diponegoro. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(2), 319-334.

#### **Peraturan :**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

**Website :**

Realita Kelam Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, <https://gemakeadilan.com/post/realita-kelam-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus>.

Menteri Sosma BEM UB Lecehkan 4 Korban, Berikut Kronologinya, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6323543/menteri-sosma-bem-ub-lecehkan-4-korban-berikut-kronologinya>.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukungan>.

Mendikbudristek: Ada Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi!, <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mendikbudristek-ada-darurat-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi/>.

Komnas Perempuan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Paling Tinggi di Universitas, <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas/6525659.html>.

Data Resmi Kemendikbudristek, <https://itjen.kemdikbud.go.id/webnew/2021/11/13/mendikbudristek-ada-darurat-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi/>.

Resmi Ditetapkan ini Tugas Satgas PPKS Unpad, <https://www.unpad.ac.id/2022/09/resmi-ditetapkan-ini-tugas-satgas-ppks-unpad/>.

Sexual Violence, <https://apps.who.int/violence-info/sexual-violence/>.

Komnas Perempuan. 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, melalui <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentukkekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>.

Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Konflik – 19 Juni, <https://indonesia.un.org/id/237065-hari-internasional-penghapusan-kekerasan-seksual-dalam-konflik-19-juni>.

Survei Kemendikbudristek Kekerasan Seksual Terbanyak di Perguruan Tinggi, <https://www.rri.co.id/aceh/hukum/414708/survei-kemendikbudristek-kekerasan-seksual-terbanyak-di-perguruan-tinggi>.

Apa itu Kekerasan Seksual?, [https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/#:~:text=Menurut%20Komnas%20Perempuan%20\(2017\)%2C,statu s%20sosialnya%20untuk%20mengendalikan%20korban](https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/#:~:text=Menurut%20Komnas%20Perempuan%20(2017)%2C,statu s%20sosialnya%20untuk%20mengendalikan%20korban).

Realita Kelam Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, <https://gemakeadilan.com/post/realita-kelam-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus>.

Kasus dugaan pelecehan seksual di Universitas Pancasila, korban: 'Tidak apa-apa saya buka aib, asal mendapatkan keadilan', <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjeve2585y8o>.

Geger Kasus Pelecehan Seksual di Kampus Unand, 2 Mahasiswa FK Akhirnya Jadi Tersangka, <https://www.liputan6.com/regional/read/5244974/geger-kasus-pelecehan-seksual-di-kampus-unand-2-mahasiswa-fk-akhirnya-jadi-tersangka?page=2>.

Permen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Tuai Dukungan, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukungan>.

Mendikbudristek ada Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mendikbudristek-ada-darurat-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi/>.

Dosen UPN Yogya Buka Suara Soal Surat Minta Maaf Lecehkan Mahasiswi, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240507171908-20-1095118/dosen-upn-yogya-buka-suara-soal-surat-minta-maaf-lecehkan-mahasiswi>.

Isi Sanksi Rektor untuk Dosen UPN Veteran Yogyakarta yang Lakukan Pelecehan Seksual Mahasiswi, <https://sleman.pikiran-rakyat.com/viral/pr-3048062642/isi-sanksi-rektor-untuk-dosen-upn-veteran-yogyakarta-yang-lakukan-pelecehan-seksual-mahasiswi?page=all>.

Kasus Sodomi di Kampus Universitas Islam Riau Pelaku dan Korban Mahasiswa PMM, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-sodomi-di-kampus-universitas-islam-riau-pelaku-dan-korban-mahasiswa-pmm.html>.

Mendikbudrisrek Apresiasi Kinerja Satgas PPKS di Perguruan Tinggi, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/10/mendikbudristek-apresiasi-kinerja-satgas-ppks-di-perguruan-tinggi>.

Pembentukan Satgas PPKS di PTN Capai PTN 100 dan PTS 50, <https://mediaindonesia.com/humaniora/670787/pembentukan-satgas-ppks-di-ptn-capai-100-dan-pts-50>.

Pedoman Permen 30 Tahun 2021 Kekerasan Seksual, [https://l1dikti3.kemdikbud.go.id/v6/wp-content/uploads/2022/03/Pedoman-Permen-30-2021\\_KS.pdf](https://l1dikti3.kemdikbud.go.id/v6/wp-content/uploads/2022/03/Pedoman-Permen-30-2021_KS.pdf).

UPI sudah berani membuka data kasus kekerasan seksual, kampus-kampus lain kapan, <https://bandungbergerak.id/article/detail/159305/upi-sudah-berani-membuka-data-kasus-kekerasan-seksual-kampus-kampus-lain-kapan>.

Pernah Dilecehkan Mahasiswa Pada 2017 Hanya Sanksi dan Dibina Unibraw, <https://kumparan.com/kumparannews/nw-pernah-dilecehkan-mahasiswa-pada-2017-hanya-disanksi-dan-dibina-unibraw-1x3Y5lw1ghq/full>.

Kesiapan Kampus Hadapi Kekerasan Seksual Meningkat Semenjak Permendikbudristek PPKS Diberlakukan, <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/kesiapan-kampus-hadapi-kekerasan-seksua-meningkat-semenjak-permendikbudristek-ppks-diberlakukan/>.

Data Primer, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>.

### **Skripsi :**

Muhammad Hidayah Tullah. (2023). Analisis yuridis tindak pidana kekerasan seksual non-fisik. Skripsi. Diterbitkan. Universitas Bosowa: Makassar.